# 5. BIDANG SOSIAL

## LATIHAN SOAL SKB BIDANG SOSIAL

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak lanjut usia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan kawasan ramah lanjut usia yang pedomannya diatur melalui ....
   A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
   B. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015
   C. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017
   D. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004
   E. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

2. Salah satu bentuk rehabilitasi sosial sebagai bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah ....
   A. Pemberian bantuan usaha
   B. Pelatihan keterampilan
   C. Supervisi dan advokasi sosial
   D. Penguatan kelembagaan
   E. Bantuan dan asistensi sosial

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 mengatur tentang ....
   A. Penanganan Gelandangan dan Pengamen Jalanan
   B. Penanganan Fakir Miskin
   C. Sistem Jaminan Sosial Nasional
   D. Pedoman Program Perlindungan Sosial
   E. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

4. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip ....
   A. Asuransi sosial
   B. Asuransi sosial atau prinsip ekuitas
   C. Asuransi sosial atau tabungan wajib
   D. Asuransi sosial atau tabungan sukarela
   E. Prinsip ekuitas atau tabungan wajib

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 mengatur tentang ....
   A. Program Keluarga Harapan
   B. Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah

C. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
D. Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
E. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

6. Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi syarat-syarat berikut, kecuali ....
   A. Terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
   B. Belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
   C. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga.
   D. Mendapat rekomendasi dari desa atau kelurahan setempat.
   E. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri.

7. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, seseorang setidaknya harus berusia ....
   A. 35 tahun
   B. 40 tahun
   C. 45 tahun
   D. 50 tahun
   E. 60 tahun

8. Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian ditetapkan oleh ....
   A. Presiden
   B. Wakil presiden
   C. Menteri
   D. Inspektur jenderal
   E. Kepala daerah

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 adalah produk hukum yang mengatur tentang ....
   A. Kesejahteraan Sosial
   B. Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
   C. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
   D. Kesejahteraan Lanjut Usia
   E. Kementerian Sosial

10. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan ....
    A. Hak dan kewajiban sebagai warga negara
    B. Aturan setempat yang berlaku
    C. Kearifan lokal masyarakat
    D. Norma-norma dasar negara
    E. Kebutuhan dasar minimal

11. Pendataan dan pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilaksanakan oleh ....

A. Kementerian Sosial
B. Instansi sosial provinsi
C. Instansi sosial kabupaten
D. Pemerintah desa
E. BPS

12. Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional yang bertanggung jawab kepada ....
A. DPR
B. Presiden
C. Wakil presiden
D. Menteri Sosial
E. Menteri Keuangan

13. Untuk mendorong, mengoordinasi, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu dibentuk ....
A. Asosiasi Badan Usaha Penyelenggara Kesehatan Sosial
B. Tim Pemantau Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha
C. Badan Pemeriksa Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha
D. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha
E. Tim Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha

14. Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berikut ini, kecuali ....
A. Rehabilitasi sosial
B. Jaminan sosial
C. Pemberdayaan sosial
D. Perlindungan sosial
E. Kemandirian sosial

15. Evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia harus dilakukan setidaknya ... kali dalam satu tahun.
A. Satu
B. Dua
C. Tiga
D. Empat
E. Lima

16. Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Sosial mencakup aspek-aspek manajerial berikut ini, kecuali ....
A. Perkembangan realisasi penyerapan dana
B. Pencapaian target keluaran
C. Catatan atas laporan keuangan
D. Kendala yang dihadapi
E. Saran tindak lanjut

17. Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha merupakan salah satu bentuk dari ....

A. Rehabilitasi sosial
B. Jaminan sosial
C. Bantuan sosial
D. Pemberdayaan sosial
E. Perlindungan sosial

18. Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat sesuai perannya dalam susunan pengawas forum tanggung jawab badan usaha di tingkat nasional menjabat sebagai ....
A. Pengawas utama
B. Pengawas pembina
C. Pengawas madya
D. Pengawas
E. Anggota

19. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di ....
A. Wilayah perbatasan negara
B. Wilayah pinggirang kota besar
C. Wilayah kumuh perkotaan
D. Wilayah tinggi angka kemiskinan
E. Wilayah sulit dijangkau

20. Pelaksanaan penanganan fakir miskin di tingkat provinsi dikoordinasi oleh ....
A. Menteri
B. Inspektur jenderal
C. Gubernur
D. Ketua DPRD
E. Kepala Instansi Sosial

21. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ....
A. Rehabilitasi sosial
B. Jaminan sosial
C. Bantuan sosial
D. Pemberdayaan sosial
E. Perlindungan sosial

22. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab ....
A. Lembaga Kesejahteraan Sosial
B. Desa
C. Badan usaha
D. Masyarakat
E. Pemerintah dan pemerintah daerah

23. Berikut merupakan bagian dari sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin, kecuali ....
A. Tim ahli penanganan masalah sosial
B. Tenaga pendamping
C. Tenaga kesejahteraan sosial
D. Relawan sosial
E. Pekerja sosial profesional

24. Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini, kecuali ....
A. Akuntabel

B. Transparan
C. Demokratis
D. Pembinaan
E. Sukarela

25. Dewan Jaminan Sosial Nasional terdiri atas unsur pemerintah, tokoh dan/ atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, serta organisasi pekerja, yang berjumlah sebanyak ....
A. 15 orang
B. 20 orang
C. 30 orang
D. 35 orang
E. 60 orang

# KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SOAL SKB BIDANG SOSIAL

1. Jawaban: C
   Produk hukum yang mengatur tentang pedoman pengembangan kawasan ramah lanjut usia adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017.

2. Jawaban: E
   Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:
   - Motivasi dan diagnosis psikososial
   - Perawatan dan pengasuhan
   - Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
   - Bimbingan mental spiritual
   - Bimbingan fisik
   - Bimbingan sosial dan konseling psikososial
   - Pelayanan aksesibilitas
   - Bantuan dan asistensi sosial
   - Bimbingan resosialisasi
   - Bimbingan lanjut
   - Rujukan

3. Jawaban: B
   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 adalah undang-undang yang mengatur tentang penanganan fakir miskin.

4. Jawaban: C
   Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.

5. Jawaban: A
   Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 adalah produk hukum yang mengatur tentang program keluarga harapan.

6. Jawaban: D
   Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi syarat, sebagai berikut.
   - Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
   - Belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
   - Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga.
   - Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, girik, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

7. Jawaban: B
   Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam

puluh) tahun pada saat menjadi anggota.

8. Jawaban: C

   Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh menteri dan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

9. Jawaban: A

   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 berisi tentang kesejahteraan sosial.

10. Jawaban: E

    Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

11. Jawaban: C

    Pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh instansi sosial kabupaten/kota.

12. Jawaban: B

    Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada presiden.

13. Jawaban: D

    Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Menteri membentuk suatu Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.

14. Jawaban: E

    Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:

    - Rehabilitasi sosial
    - Jaminan sosial
    - Pemberdayaan sosial
    - Perlindungan sosial
    - Penanggulangan kemiskinan

15. Jawaban: A

    Evaluasi untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

16. Jawaban: C

    Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Sosial mencakup aspek-aspek manajerial berikut ini.

    - Perkembangan realisasi penyerapan dana
    - Pencapaian target keluaran
    - Kendala yang dihadapi
    - Saran tindak lanjut

Catatan atas laporan keuangan termasuk ke dalam aspek akuntabilitas.

17. Jawaban: D

    Pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk:
    - Diagnosis dan pemberian motivasi
    - Pelatihan keterampilan
    - Pendampingan
    - Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha
    - Peningkatan akses pemasaran hasil usaha
    - Supervisi dan advokasi sosial
    - Penguatan keserasian sosial
    - Penataan lingkungan
    - Bimbingan lanjut

18. Jawaban: A

    Pengawas utama dalam pengawas forum tanggung jawab badan usaha di tingkat nasional dijabat oleh Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.

19. Jawaban: E

    PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau.

20. Jawaban: C

    Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi.

21. Jawaban: C

    Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
    - Rehabilitasi sosial
    - Jaminan sosial
    - Pemberdayaan sosial
    - Perlindungan sosial

22. Jawaban: E

    Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

23. Jawaban: A

    Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin dilakukan oleh tenaga penanganan fakir miskin yang terdiri atas:
    - Tenaga kesejahteraan sosial
    - Pekerja sosial profesional
    - Relawan sosial
    - Penyuluh sosial
    - Tenaga pendamping

24. Jawaban: D

    Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pada prinsip:
    - Sukarela
    - Demokratis

- Akuntabel
- Transparan
- Sinergi.

25. Jawaban: A

    Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 (lima belas) orang, yang terdiri atas unsur pemerintah, tokoh dan/atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, serta organisasi pekerja.